KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEGUH PUDJO RUMEKSO**

Jabatan : **Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**TEGUH PUDJO RUMEKSO**

Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Polhukam
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
SDM yang Kompetitif	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70
Organisasi yang *Fit & Purpose*	Nilai RB Kemenko Polhukam	79
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	3
	2. % (Persentase) Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	53%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	3. Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam	96

Jumlah Anggaran Program:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya: Rp285.388.941.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2023

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

TEGUH PUDJO RUMEKSO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	SDM yang Kompetitif
Indikator Kinerja 1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
Sumber Data	Sumber data yang diperoleh dari data pegawai meliputi: a. Pendidikan formal b. Kompetensi pegawai c. Penilaian prestasi kerja d. Disiplin pegawai
Cara Menghitung	Perhitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut: a) Kualifikasi Pendidikan Formal (25%) - Pendidikan S-3 (Nilai 25) - Pendidikan S-2 (Nilai 20) - Pendidikan S-1/D-IV (Nilai 15) - Pendidikan D-III (Nilai 10) - Pendidikan D-II/D-I/SLTA/Sederajat (Nilai 5) - Dibawah SLTA (Nilai 1) b) Kompetensi Pegawai (40%) Disesuaikan berdasarkan kedudukan dalam jabatan, seperti: - Diklat Kepemimpinan untuk pejabat struktural (Nilai 15) jika belum (Nilai 0) - Diklat Fungsional untuk pejabat Fungsional (Nilai 15) jika belum (Nilai 0) - Diklat Teknis bagi PNS yang menduduki JPT/JA/JF paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan (Nilai 15) jika belum (Nilai 0) - Diklat Teknis bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan jabatan dalam 1 tahun terakhir (Nilai 22.5) jika belum (Nilai 0) - Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya bagi PNS yang Menduduki JPT/JA/JF paling sedikit 20 JP yang mendukung sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir (Nilai 10) jika belum (Nilai 0)

	- Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana paling sedikit 20 JP yang mendukung sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir (Nilai 17.5) jika belum (Nilai 0) c) Penilaian Prestasi Kerja (30%) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 91-100 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 30) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 76-90 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 25) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 61-75 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 15) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 51-60 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 5) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 50 kebawah dalam 1 tahun terakhir (Nilai 1) d) Disiplin Pegawai (5%) - PNS tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 5) - PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan (Nilai 3) - PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang (Nilai 2) - PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat (Nilai 1) - Hukuman Disiplin telah mempunyai keputusan final dihitung dalam waktu 5 tahun terakhir
Sasaran Strategis	Organisasi yang *Fit & Purpose*
Indikator Kinerja 1	Nilai RB Kemenko Polhukam
Definisi	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat 8 area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu area manajemen perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Indeks RB yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB sebagai tim penilai Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai KemenPAN RB
Sasaran Strategis	Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal
Indikator Kinerja 1	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat

Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan layanan dukungan sekretariat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Adapun kriteria penilaian indeks adalah sebagai berikut: - 1 = Sangat Tidak Puas - 2 = Tidak Puas - 3 = Puas - 4 = Sangat Puas
Sumber Data	Pelaksanaan survey yang dilakukan pada seluruh unit kerja di bawah koordinasi Sesmenko Polhukam
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ indeks kepuasan layanan pada unit organisasi di bawah koordinasi Sesmenko Polhukam
Indikator Kinerja 2	% (Persentase) laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
Cara Menghitung	$\sum =$ persentase laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
Sasaran Strategis	Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal
Indikator Kinerja 1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Definisi	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu: WTP, WDP, *adversed*, dan *disclaimer*.
Sumber Data	Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI
Cara Menghitung	Penilaian yang berasal dari BPK RI
Indikator Kinerja 2	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam

Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 3	Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam
Definisi	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan menghasilkan informasi informasi capaian capaian kinerja kinerja yg telah ditetapkan ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.
Sumber Data	Data Dokumen RKA-K/L, Data RKA-K/L/DIPA, SP2D, Bukti-bukti yang kredibel, review dokumen, survey, atau FGD.
Cara Menghitung	1. Pengukuran Aspek Implementasi 2. Pengukuran Aspek Manfaat 3. Pengukuran Aspek Konteks *pengukuran dilakukan melalui aplikasi SMART DJA

Sekretaris Kemenko Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan,

TEGUH PUDJO RUMEKSO